

ANALISIS POLA LITERASI POLITIK OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TERHADAP PEMILIH PEMULA PADA PEMILU 2024

Dina Fitria Amalia¹, Alif Aditya Candra², Hendra³

Universitas Jambi, Indonesia

amaliadina361@gmail.com¹, alifadityacandra@gmail.com², hendra92@unja.ac.id³

ABSTRACT

This study aims to analyze the political literacy patterns carried out by the Jambi Provincial KPU towards new voters in the 2024 election. The main focus of this study is to identify political information needs, search strategies, information communication movements, and product evaluations of the final political process. The method used is a qualitative approach with a descriptive design, collecting data through interviews and documentation. The results of the study indicate that although the KPU has made good efforts to improve political literacy, there are still various obstacles that need to be overcome, such as apathy among young voters and lack of use of social media. The KPU needs to develop a more varied approach and use digital platforms to reach new voters effectively. The recommendations generated from this study are expected to improve the quality and reach of political literacy programs, as well as encourage more active political participation among new voters in Indonesia.

Keywords: Political Literacy, First-time Voters, 2024 Election

PENDAHULUAN

Pemilih pemula sering menghadapi tantangan berupa kurangnya pemahaman dan kesadaran politik, yang dapat memengaruhi keputusan mereka dalam pemilu. Ketidapahaman ini sering kali berujung pada keputusan yang kurang informasional atau dipengaruhi oleh faktor eksternal yang tidak relevan, seperti hoaks atau konten viral. Sebagai lembaga penyelenggara pemilu, KPU memiliki tanggung jawab besar dalam meningkatkan literasi politik melalui program edukasi dan sosialisasi yang menyeluruh. Namun, efektivitas program

KPU dalam menjangkau pemilih pemula dan meningkatkan literasi politik mereka masih perlu dievaluasi, terutama menjelang Pemilu 2024. Pemilih pemula membutuhkan informasi yang jelas, mudah dipahami, dan edukatif agar mereka dapat berpartisipasi secara bijak dalam proses demokrasi, serta membuat keputusan yang berdasarkan pada pengetahuan yang benar. Oleh karena itu, penting untuk terus mengevaluasi dan menyesuaikan metode literasi politik agar dapat memberikan dampak yang maksimal terhadap pemilih pemula di seluruh Indonesia.

Fondasi demokrasi yang kuat dalam

suatu negara tercermin dalam fungsi utama pemilu, yang tidak hanya sebagai sarana untuk memilih pemimpin, tetapi juga sebagai wadah untuk membentuk legitimasi pemerintah dan penguasa, menciptakan representasi politik bagi rakyat, mengatur perputaran elite penguasa, dan memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Pemilu yang sehat dan adil merupakan inti dari sebuah sistem demokrasi yang berfungsi untuk memastikan bahwa pemerintah yang terpilih memiliki dukungan sah dari rakyat, serta mencerminkan keberagaman aspirasi politik yang ada. Hal ini selaras dengan pendapat Saihu (2021) yang menyatakan bahwa ada empat fungsi utama dalam pelaksanaan pemilu, yaitu sebagai wadah untuk membentuk legitimasi pemerintah dan penguasa, tempat tegaknya representasi politik rakyat, mekanisme untuk mengatur perputaran elite penguasa, dan sebagai sarana pendidikan politik bagi rakyat. Oleh karena itu, pemilu tidak hanya menjadi ajang untuk memilih pemimpin, tetapi juga berperan penting dalam memperkuat proses demokrasi itu sendiri, sekaligus meningkatkan partisipasi politik yang cerdas dan berinformasi.

Kegiatan literasi politik yang dilakukan oleh KPU masih dinilai belum

efektif karena pendekatannya yang terkesan monoton dan terbatas pada kegiatan lapangan, tanpa memanfaatkan potensi media sosial secara maksimal. Informasi yang disampaikan sering kali kurang relevan atau tidak cukup menarik bagi pemilih pemula, sehingga kesulitan dalam menjangkau mereka secara optimal. Padahal, literasi politik yang baik sangat penting untuk membantu pemilih memahami proses demokrasi, meningkatkan kualitas keputusan politik yang mereka buat, dan mendorong partisipasi politik yang lebih kritis dan informasional. Untuk itu, KPU perlu mengembangkan pendekatan yang lebih variatif, dengan memanfaatkan platform digital yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari pemilih pemula, seperti media sosial dan aplikasi interaktif, serta mengadaptasi konten yang lebih sesuai dengan minat dan kebutuhan generasi muda.

Literasi politik yang baik bagi warga negara, khususnya pemilih pemula, dapat menghasilkan keputusan yang lebih informasional dan kritis dalam pemilu, yang pada gilirannya memperkuat legitimasi pemerintahan yang terpilih dan mencegah terjadinya disinformasi serta manipulasi politik. Dengan pemahaman

yang lebih baik tentang hak dan kewajiban politik, pemilih dapat lebih bijak dalam menentukan pilihannya, yang berkontribusi pada kualitas demokrasi itu sendiri. Dalam konteks ini, literasi politik dapat dianggap sebagai acuan kekuatan dalam menjalankan proses demokrasi yang sehat dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan pandangan Heryanto (2021) yang menyatakan bahwa literasi politik memainkan peran penting dalam konsolidasi demokrasi Indonesia, khususnya dalam menghadapi tantangan politik yang semakin kompleks di era modern ini. Oleh karena itu, memperkuat literasi politik di kalangan pemilih pemula tidak hanya akan meningkatkan partisipasi politik, tetapi juga memastikan bahwa proses demokrasi berjalan dengan lebih transparan dan akuntabel.

Penelitian ini sangat penting karena literasi politik merupakan bagian integral dari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), yang bertujuan untuk membentuk warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya, termasuk dalam konteks partisipasi politik yang aktif. Dalam kerangka ini, literasi politik tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan pemahaman tentang proses demokrasi, tetapi juga untuk

menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam berpartisipasi dalam pemilu. Dengan menganalisis pola literasi politik yang dilakukan oleh KPU Provinsi Jambi, penelitian ini berpotensi memberikan wawasan mendalam tentang tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam penyebaran informasi politik. Hasil analisis ini dapat menjadi dasar untuk merumuskan rekomendasi yang lebih efektif dalam meningkatkan kualitas dan jangkauan program literasi politik, sehingga dapat memperkuat partisipasi pemilih pemula dan memperbaiki kualitas demokrasi di Indonesia.

Sebagai penelitian yang masih jarang dilakukan, analisis ini memiliki kebaruan yang signifikan dalam konteks Pemilu 2024, khususnya dalam hal pendekatan literasi politik yang melibatkan pemilih pemula. Pemilu 2024 menjadi momentum penting di mana literasi politik dapat diperkuat melalui pemanfaatan platform digital secara efektif. Dengan menggunakan media digital yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari pemilih pemula, KPU dapat lebih mudah menyampaikan informasi politik yang relevan dan menarik. Selain itu, literasi digital yang baik juga sangat penting untuk membantu pemilih menilai informasi

dengan lebih kritis, mengidentifikasi hoaks, dan menghindari manipulasi politik yang sering kali beredar di dunia maya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola literasi politik yang diterapkan oleh KPU Provinsi Jambi, mengungkap hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas program literasi politik, agar dapat meningkatkan partisipasi politik dan kualitas demokrasi di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif yang bercirikan struktur desain deskriptif. Dalam karyanya Khairinal (2018) mengartikan penelitian kualitatif sebagai suatu metode yang menekankan pada penyampaian informasi yang berkualitas tinggi dengan memberikan gambaran secara rinci dan tegas mengenai fenomena yang diteliti dengan menggunakan kata-kata. Hal ini bertujuan agar peneliti dapat menganalisis dan mempelajari lebih mendalam mengenai hambatan pola literasi politik oleh KPU Provinsi Jambi terhadap pemilih pemula dalam pemilu 2024. Dengan menggunakan metodologi ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan

yang berguna dalam merancang strategi literasi politik yang lebih efektif di masa depan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berdasarkan analisis data utama dari wawancara dan dokumentasi, ditemukan temuan terkait pola literasi politik yang dilakukan oleh KPU Provinsi Jambi terhadap pemilih pemula pada pemilu 2024. Penelitian ini mengidentifikasi empat indikator dari teori Katarudin (2020) : 1) Kebutuhan Informasi Politik; 2) Strategi Pencarian; 3) Gerakan Komunikasi Informasi; dan 4) Evaluasi Produk dari Proses Akhir Politik.

1. Kebutuhan Informasi Politik

Hasil wawancara dengan informan menyatakan bahwa terdapat kebutuhan mendesak bagi pemilih pemula untuk mendapatkan informasi politik yang komprehensif. KPU menekankan pentingnya pemahaman tentang demokrasi, pemilu, hak dan kewajiban pemilih, serta profil calon. Pemilih pemula, yang terdiri dari mahasiswa PPKn angkatan 2022, 2023, dan 2024, merasa bahwa informasi yang diberikan KPU sangat berpengaruh terhadap keputusan mereka dalam

menggunakan hak pilih. Pengetahuan yang mendalam diharapkan dapat mengurangi sikap apatis dan meningkatkan partisipasi.

KPU juga berupaya menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak, seperti kampus dan sekolah, untuk memperkuat penyampaian informasi. Media sosial menjadi saluran utama yang digunakan untuk menjangkau pemilih muda, dengan pendekatan yang menarik dan relevan. Kegiatan literasi politik melalui sosialisasi dianggap sebagai pondasi penting untuk memastikan bahwa pemilih pemula dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik dan benar.

2. Strategi Pencarian

KPU menerapkan strategi multikanal dalam penyediaan informasi politik, yang mencakup metode konvensional dan non-konvensional. Metode konvensional melibatkan sosialisasi tatap muka di universitas dan sekolah, serta mengadakan webinar dan diskusi kelompok. Sementara itu, metode non-konvensional memanfaatkan *platform* media sosial seperti *Instagram*, *TikTok*, dan *YouTube* untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Penekanan pada informasi yang mudah dipahami dan menarik bagi pemilih pemula menjadi fokus utama dalam penyampaian materi.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pemilih pemula lebih mengandalkan media sosial, khususnya *Instagram*, untuk mencari informasi politik. Meskipun banyak informasi tersedia di media sosial, pemilih pemula tetap membutuhkan waktu untuk memverifikasi keakuratan informasi. Pendekatan kritis dalam mencari informasi diharapkan dapat membantu mereka memilah sumber yang kredibel, menghindari hoaks, dan memahami isu politik secara mendalam.

3. Gerakan Komunikasi Informasi

KPU Provinsi Jambi aktif menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak untuk menyebarluaskan informasi politik. Kerja sama ini melibatkan media, lembaga pendidikan, komunitas, dan organisasi masyarakat sipil dalam rangka memperluas jangkauan literasi politik. Melalui berbagai bentuk kolaborasi, seperti seminar, diskusi, dan kampanye, KPU dapat memanfaatkan sumber daya yang ada untuk meningkatkan efektivitas penyampaian informasi kepada pemilih pemula.

Meskipun kolaborasi ini menunjukkan upaya strategis yang baik, efektivitasnya masih terhambat oleh beberapa tantangan. Waktu yang terbatas dan sikap apatis di kalangan pemilih muda

menjadi kendala utama dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi. KPU menyadari bahwa sosialisasi langsung di sekolah dan universitas dapat lebih efektif dalam menjangkau pemilih pemula, memberikan kesempatan bagi interaksi langsung dan diskusi lebih mendalam.

4. Evaluasi Produk dari Proses Akhir Politik

KPU melakukan evaluasi setelah setiap tahapan pemilu untuk menilai efektivitas kegiatan literasi politik yang telah dilaksanakan. Evaluasi ini mencakup penilaian terhadap semua kegiatan penyampaian informasi kepada pemilih pemula serta dampaknya terhadap partisipasi pemilih. Metode survei dan *Focus Group Discussion* (FGD) digunakan untuk mengumpulkan data dan umpan balik dari pemilih, yang diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai keberhasilan dan area yang perlu diperbaiki.

Respon dari pemilih pemula menunjukkan adanya apresiasi terhadap upaya yang dilakukan KPU, meskipun ada juga saran untuk meningkatkan pola literasi politik. Beberapa saran meliputi melibatkan pemilih muda dalam proses literasi dan menggunakan metode yang lebih interaktif, seperti game dan simulasi.

Dengan melakukan evaluasi yang lebih mendalam, KPU diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas literasi politik dan efektivitas dalam menyampaikan informasi kepada pemilih pemula.

Pembahasan

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pola literasi politik KPU Provinsi Jambi telah berjalan dengan baik, namun masih memerlukan penguatan di berbagai aspek.

Salah satu aspek penting adalah kebutuhan informasi politik yang akurat, relevan, dan menarik, terutama bagi pemilih pemula. Informasi ini mencakup visi, misi, serta program kerja dari para kandidat yang bertarung dalam pemilu. Sejalan dengan temuan Nugroho (2021), ketersediaan informasi politik yang berkualitas berkontribusi secara signifikan terhadap partisipasi politik, khususnya di kalangan pemilih muda.

Kebutuhan informasi politik menjadi faktor kunci dalam mendorong partisipasi pemilih pemula, terutama melalui penyampaian visi, misi, serta program calon secara akurat dan menarik. Pemilih pemula berpotensi menjadi agen perubahan dalam demokrasi, sehingga memahami informasi dengan baik sangat

penting.

Strategi pencarian informasi yang melibatkan kombinasi media sosial dan metode konvensional telah membantu KPU menjangkau pemilih muda. Meskipun media sosial menjadi pilihan utama, sosialisasi tatap muka dinilai masih efektif untuk memperdalam pemahaman. KPU perlu terus berinovasi dalam metode penyampaian informasi yang dapat menarik perhatian dan mengurangi sikap apatis di kalangan pemilih muda.

Tantangan seperti apatisme politik dan keterbatasan sumber daya tetap menjadi hambatan yang harus diatasi. KPU perlu mengoptimalkan komunikasi penyebaran informasi agar lebih inklusif dan relevan. Pendekatan interaktif dalam literasi politik, seperti penggunaan game dan simulasi, dapat meningkatkan keterlibatan pemilih pemula serta membantu mereka memahami proses politik dengan lebih baik.

Meskipun demikian, tantangan seperti apatisme politik, minimnya literasi digital, serta distraksi media sosial masih menjadi hambatan yang perlu ditangani secara serius. KPU perlu berinovasi dengan menggunakan pendekatan interaktif, seperti pengembangan game

edukatif, konten visual interaktif, dan simulasi e-voting, yang mampu menarik perhatian serta mempermudah pemahaman pemilih pemula tentang proses politik. Hal ini sejalan dengan gagasan Nurfadillah (2023) yang menyebutkan bahwa pendekatan digital yang kreatif dapat meningkatkan efektivitas literasi politik di kalangan generasi Z.

Pendidikan politik yang terencana dan sistematis juga berperan penting dalam membentuk kesadaran politik pemilih muda. Kolaborasi dengan lembaga pendidikan dan media lokal merupakan langkah strategis untuk menciptakan ekosistem yang mendukung partisipasi demokrasi yang lebih inklusif. Dengan sinergi ini, KPU tidak hanya memperkuat upaya edukasi politik, tetapi juga menciptakan lingkungan yang kondusif bagi keterlibatan pemilih pemula di masa depan.

Pembahasan ini sejalan dengan teori Crick (2000) dalam Heryanto (2021), yang menyatakan bahwa literasi politik melibatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang mendukung partisipasi aktif. Penelitian menunjukkan bahwa pemilih pemula membutuhkan informasi mendalam tentang demokrasi dan proses pemilu untuk mengurangi sikap apatis,

mencerminkan pentingnya pengetahuan dalam literasi politik. Hal ini juga didukung oleh Fitriani, et al (2022), yang menekankan bahwa pemahaman yang baik mendorong partisipasi berkualitas.

Dalam konteks literasi politik, strategi pencarian informasi adalah aspek penting menurut Katarudin (2020). KPU menerapkan pendekatan multikanal, memanfaatkan media sosial seperti *Instagram* dan *TikTok*, serta metode konvensional seperti sosialisasi tatap muka. Kombinasi ini menarik perhatian pemilih muda dan memungkinkan interaksi langsung. Meskipun efektif, tantangan seperti apatisme politik dan distraksi media sosial tetap ada. Oleh karena itu, strategi pencarian informasi yang inovatif dan adaptif sangat diperlukan untuk memastikan literasi politik yang inklusif bagi generasi muda.

Pendidikan politik memiliki peran krusial dalam membentuk kesadaran politik, seperti dijelaskan oleh Sumanto dan Haryanti (2021). Pendidikan yang terencana dan sistematis membekali individu dengan pemahaman mendalam tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Hal ini sangat penting, terutama bagi pemilih pemula, khususnya Generasi Z, yang memiliki potensi besar dalam

proses demokrasi namun rentan terhadap pengaruh eksternal dan minimnya pengalaman politik. Karyaningtyas (2019) menekankan bahwa literasi politik dan edukasi pemilih diperlukan untuk membantu mereka membuat keputusan yang lebih terinformasi, sehingga strategi literasi politik yang melibatkan media digital dan pendekatan edukatif menjadi sangat penting.

KPU Provinsi Jambi telah menjalin kolaborasi strategis dengan berbagai pihak, termasuk lembaga pendidikan, media, dan organisasi masyarakat, untuk memperluas jangkauan literasi politik. Lembaga pendidikan berperan sebagai mitra dalam menyelenggarakan seminar dan pelatihan yang memberikan pemahaman tentang proses demokrasi dan hak pemilih. Pendekatan ini mendukung pandangan Ali Rasyid (2023) tentang tanggung jawab lembaga pendidikan dalam membentuk generasi muda yang sadar politik. Dengan kolaborasi ini, KPU dapat memanfaatkan berbagai saluran komunikasi untuk menyebarkan informasi politik secara efektif, meskipun masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan sumber daya dan apatisme. Evaluasi juga menjadi bagian penting dalam literasi politik untuk mengukur efektivitas informasi yang

disebarkan, dengan KPU melakukan survei dan *Focus Group Discussion* (FGD) untuk menilai dampak literasi politik pada pemilih pemula.

Evaluasi berkala melalui survei dan *Focus Group Discussion* (FGD) menjadi bagian penting dari program literasi politik KPU. Evaluasi ini dilakukan untuk mengukur efektivitas strategi penyebaran informasi dan menyesuaikannya dengan karakteristik pemilih muda yang terus berkembang. Hal ini juga sejalan dengan temuan Sari & Handayani (2022) yang menekankan pentingnya refleksi dan penilaian dalam program literasi politik untuk memastikan keberlanjutan dan perbaikan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan mengenai pola literasi politik oleh KPU Provinsi Jambi terhadap pemilih pemula pada pemilu 2024, dapat disimpulkan bahwa upaya literasi politik yang dilakukan telah berjalan cukup baik melalui berbagai pendekatan, baik konvensional maupun non-konvensional. KPU fokus pada pemenuhan kebutuhan informasi politik dengan memberikan pemahaman mendalam mengenai demokrasi, pemilu, hak dan kewajiban pemilih, serta informasi terkait profil dan

visi misi calon. Meskipun demikian, masih terdapat berbagai hambatan yang dihadapi dalam menjalankan kegiatan literasi politik, yang mengindikasikan perlunya perbaikan untuk memastikan partisipasi politik yang lebih optimal dan kesadaran demokrasi yang lebih tinggi di kalangan pemilih pemula.

Strategi pencarian yang diterapkan oleh KPU meliputi sosialisasi tatap muka di universitas dan sekolah, serta penggunaan media sosial seperti *Instagram*, *TikTok*, *Facebook*, dan *YouTube* untuk menjangkau audiens yang lebih luas. KPU juga aktif menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk media, lembaga pendidikan, komunitas, dan LSM, untuk menyebarkan informasi politik secara efektif. Selain itu, evaluasi dilakukan melalui survei, polling, dan analisis keterlibatan digital, serta FGD, untuk mengukur dampak dari kegiatan literasi politik yang telah dilaksanakan. Upaya ini menunjukkan komitmen KPU dalam meningkatkan literasi politik dan partisipasi pemilih pemula di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Ali Rasyid, Fauzan. 2023. "Membangun Literasi Politik Melalui Pendidikan

- Untuk Pemilu Yang Bermartabat.”
Siyasi: Jurnal Trias Politica I(I):27–39.
- Fitriani, Liza, Imam Aminudin, and Pareng Rengi. 2022. “Pengaruh Media Sosial Terhadap Literasi Politik Generasi Milenial.” *Mediakom Jurnal Ilmu Komunikasi* 6(1):46–55.
- Heryanto, Gun Gun. 2021. *Strategi Literasi Politik*.
- Huzaifa Katarudin, Nora Eka Putri. 2020. “Pengaruh Literasi Politik Terhadap Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilukada Kota Pariaman Tahun 2018.” 2(2):70–79.
- Karyaningtyas, S. 2019. “Urgensi Sosialisasi Pemilu Bagi Pemilih Pemula.” *Majalah Ilmiah Pelita Ilmu*.
- Khairinal. 2018. “Buku Penelitian Kualitatif (Teori, Model, Dan Skema).” Pp. 1–488 in. Jambi: Salim Media Indonesia.
- Nugroho, A. (2021). Informasi Politik dan Partisipasi Pemilih Muda dalam Pemilu 2019. *Jurnal Ilmu Politik Indonesia*, 14(1), 35-49.
- Nurfadillah, A. (2023). Literasi Politik Digital dan Peran Media Sosial pada Generasi Z. *Jurnal Komunikasi dan Politik Digital*, 3(2), 22-34.
- Saihu, Mohammad. 2021. “Belajar Dari Pilkada Terakhir Tahun 2020.” *Etika Dan Pemilu* 7(Juni):4.
- Sari, M., & Handayani, L. (2022). Evaluasi Program Literasi Politik Bagi Pemilih Pemula di Kota-Kota Besar. *Jurnal Pendidikan dan Politik*, 9(1), 51-65.
- Sumanto, Djoko, and Amelia Haryanti. 2021. *Pendidikan Politik*. Vol. 7.

